RENCANA KERJA
TAHUN 2027

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB.BANGKA

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun berkenaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027 serta mendukung pencapaian Tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

(2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.

(3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

(4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Juli 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2027 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pememrintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027 ini memuat laporan evaluasi dan capaian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2026 terhadap Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.

Sungailiat, 28 Juli 2026
Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan 8
2.2 Evaluasi Capaian SPM 22
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis 22
2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 27
2.5 Inovasi Bidang Urusan 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 28
3.2 Arah kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 30

BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Tahun 2027 32
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027 33

BAB V RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 45
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 45

BAB VI PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 47
5.2 Kaidah Pelaksanaan 47
5.3 Rencana Tindak Lanjut 48

LAMPIRAN **49**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 9

Tabel 2.2 Jumlah Layanan Publik yang diselengarakan Secara Online dan terintegrasi di Kabupaten Bangka Tahun 2025 12

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2025 16

Tabel 3.1 Keterkaitan antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kab. Bangka Tahun 2026 Dengan sasaran Pembangunan 30

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Sasaran dan Target Renja 2027 29

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kab Bangka 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Setelah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang dimulai pada minggu kedua tahun sebelumnya, tahapan penyusunan perencanaan perangkat daerah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan terakhir penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan periode Renstra Dinkominfotik Tahun 2025-2029, maka penyusunan Rancangan Renja Dinkominfotik Tahun 2027 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renstra Dinkominfotik Tahun 2025-2029.

Selain hal tersebut diatas, penyusunan Renja Dinkominfotik Tahun 2027 juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Dinkominfotik tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinkominfotik Tahun 2027 telah selaras dengan rencana pencapaian sasaran Renstra Dinkominfotik yang secara bersama-sama dengan penyusunan Renja dirumuskan. Renja Dinkominfotik tahun 2027 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Bangka menyusun Renja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2027 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda
d. Perumusan Renja Perangkat Daerah
e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten BangkaTahun 2027;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten BangkaTahun 2027;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2028.

Renja Perangkat Daerah Dinkominfotik Kabupaten Bangka disusun sejalan denganTema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 yaitu ***"Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan".***

Tema dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 di atas berfokus pada 3 (tiga) komponen-komponen fondasi utama pembangunan yang terdiri daripembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Diskominfo Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana KerjaTahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaam Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bobot, serta Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027, yaitu :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2027 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinkominfotik;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Renstra 2025-2029 sebagai Tahun ketiga periode 2025-2029;
3. Tersedianya penjabaran Rencana Strategis Dinkominfotik kedalam Rencana Operasional Tahun 2027;
4. Terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinkominfotik;
5. Terlaksananya pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
6. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian, statistic antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.
7. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu: (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya Rencana kerja 2027 Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan Rencana kerja 2027 ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan Rencana kerja 2027; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan Rencana kerja 2027.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini berisi lima hal pokok yaitu: (1) Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan; (2) Evaluasi Capaian SPM; (3) Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis; (4) telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD; (5) Inovasi Bidang Urusan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi penjabaran tentang: (1) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; (2) Arah kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memaparkan (1) Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 secara umum; (2) Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan secara rinci disajikan dalam lampiran yang berbentuk matrik yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan (1) Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian; (2) Kaidah Pelaksanaan; (3) Rencana Tindak Lanjut yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang urusan

Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka adalah penjabaran tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinkominfotik ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh dinkominfotik selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2027. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2025 Anggaran Belanja Langsung Dinkominfotik Kabupaten Bangka sebesar Rp.8.226.193.780,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi keuangan sebesar Rp.7.590.136.170,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,09% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,27%.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Tahun anggaran 2026 dengan total anggaran sebesar **Rp.7.444.220.800,00** untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Tingkat Kinerja

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinkominfotik Tahun 2025-2029 dan diperjanjian secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, capaian IKU Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKKI
Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 (%)
			Target	**Realisasi**	**%**		
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (77,21)	BB (77,21)	BB (77,21)	100,00	100%	100,00
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,90	78,90	83,54	105,88	100%	105,88
3.	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi	6,06	6,06	6,06	100,00	100%	100,00
	Rata-rata capaian				101,47		101,47

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 (%)
			Target	**Realisasi**	**%**		
A	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**						
10.	**Komunikasi dan Informatika**						
10.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100,00	100%	100%
10.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100,00	100%	100%
10.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35	35	35	100,00	100%	100%
14.	**Statistik**						
14.1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	0	0	0	100,00	100%	100%
15.	**Persandian**						
15.1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	0	0	0	100,00	100%	100%
D	**Fungsi Penunjang**						
5.	Transparansi dan partisipasi publik						
5.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100,00	100%	100%
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100,00	100%	100%

Secara umum capaian kinerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2025 telahsesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinkominfotik Tahun 2024-2026 bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja atas indikator ***"Indeks Kepuasan Masyarakat" dan "Persentase layanan Teknologi Informasi melalui SPBE"*** yang sesuai dengan RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi capaian ini tidak bersifat permanen. Apabila Dinkominfotik tidak berhati-hati dalam mengendalikan pencapaian kinerjanya maka dapat dipastikan capaian kinerja atas semua indikator tersebut dapat menurun atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat kami tampilkan di Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka No.188.45/87/SK/DINKOMINFOTIK/2025 tanggal 15 Januari 2025 dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.45/ 87 /SK/DINKOMINFOTIK/2025

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA ,

Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan pasal (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
b. bahwa untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menciptakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas salah satunya dapat ditentukan melalui penyusunan dan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, hasil perhitungan dan penyusunan Indeks Kepuasan Masyrakat/ Aparatur perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 61);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024, dengan indeks hasil survey 78,90.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

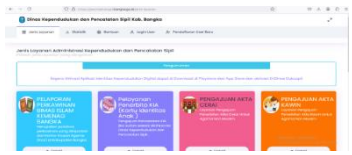
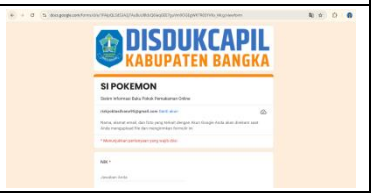
Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2025

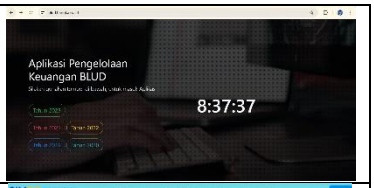
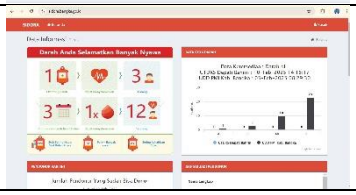
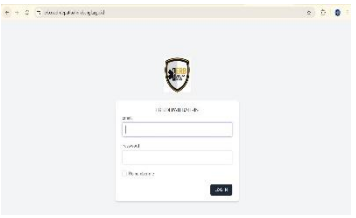
KEPALA DINAS,

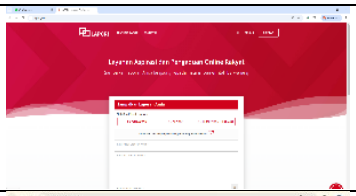
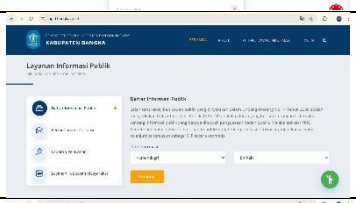
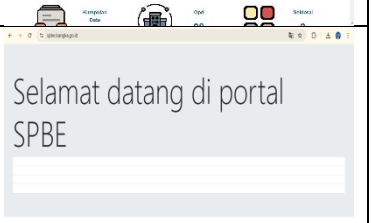
TEDDY SUDARSONO

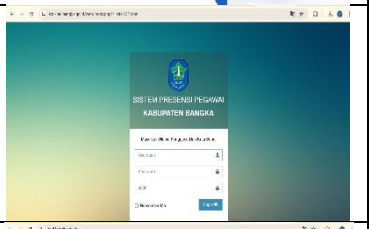
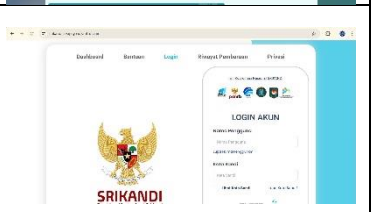
Untuk indikator Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI DI KAB. BANGKA TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi	Sub Layanan Publik	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Layanan Perizinan dinpmp2kukm.bangka.go.id	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Lokasi 3. Izin Usaha Jasa Kontruksi	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Kependudukan Online pesonadukcapil.bangka.go.id	1. KK 2. Suket 2 3. KK Kitap	
		Layanan Kependudukan Online bit.ly/pokemonbangka	Akte Kematian	
		Laynan Kependudukan Online bit.ly/m/TREKMATRASDUKCAPILBANGKA	Tim Reaksi Cepat Melayani Masyrakat Priotritas	
3.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Layanan Pajak Sistem Dukungan dan Pelayanan Pajak (SEDULANG) Kabupaten Bangka	1. Pajak	
		Layanan Perencanaan dan Keuangan sipd.kemendagri.go.id	1. Anggaran	
		Layanan Pengadaan Barang dan Aset simbmd-bangkakab.simdacloud.id	1. Belanja Modal 2. Aset	

		Layanan Pengelolaan Keuangan BLUD blud.bangka.go.id	Keuangan BLUD	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Informasi Manajemen Bangunan Gedung simbg.pu.go.id	1. Persetujuan Pembangunan Gedung	
5.	Dinas Pariwisata dan Budaya	Layanan Informasi Pariwisata exotic.bangka.go.id	1. Informasi Wisata 2. Reservasi Hotel	
6.	Dinas Kesehatan	Layanan Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman smartinpirt-bangka.babelprov.go.id/smartin_pirt/	Izin Produksi Makanan dan Minuman	
		Layanan Informasi Kesehatan	Informasi Manajemen Pasien di Puskesmas	
		Layanan Ketersediaan Bed Fasilitas Layanan Kesehatan spgdt.bangka.go.id	Ketersediaan Bed Rumah Sakit	
		Layanan Donor Darah sidora.bangka.go.id	Stok Darah	
		Layanan Kesehatan Yang Dikembangkan Oleh RSUD Depati Bahrin Bangka ERB (Emergency Rescue Brigade) erb.rsud-depatibahrin.bangka.go.id Playstore : ERB Depati Bahrin	Penjemputan Pasien Sampai Ke Rumah Sakit	
		Layanan Informasi Covid-19 covid19.bangka.go.id	Data Statistik Covid19 Bangka	

7.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Layanan Pengaduan Sp4n Lapor lapor.go.id	Pengaduan Online Rakyat Sebagai Admin Kabupaten Bangka	
		Layanan Informasi Publik ppid.bangka.go.id	Informasi Publik	
		Layanan Satu Data Indonesia satudata.bangka.go.id		
		Layanan SPBE spbe.bangka.go.id	1. Formulir Pengaduan SPBE 2. Pendataan Akses Internet 3. Formulir Administrator Pengelola Layanan SPBE 4. Absensi Sertifikat BimTek Smart City Tahap IV Tahun 2023	
8.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan Data Keluarga BKKBN siga.bkkbn.go.id	Laporan Data Keluarga Berencana	
9.	Dinas Sosial	Layanan Kesejahteraan Sosisal dan Bansos siks.kemensos.go.id	1. Mengelola data kesejahteraan sosial 2. Memproses pendaftaran bansos 3. Memasukkan dan memperbarui data kemiskinan	
10.	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Ketenagakerjaan siapkerja.kemnaker.go.id	1. Informasi lowongan kerja 2. Informasi Pelatihan Keterampilan	
		Layanan Administrasi Kepegawaian sipakdu.bangka.go.id	Administrasi Pegawai Dinakerperindag	
11.	BKPSDMD	Layanan Pesiun pensiunan-siasn.bkn.go.id	Data Pensiun Kabupaten Bangka	

				
		Layanan Absensi Kepegawaian sidikjari.bangka.go.id	1. Absensi Fingerprint 2. Data Pegawai 3. Laporan Pekerjaan Harian	
		Layanan Informasi ASN (CPNS, PPPK, Lelang Jabatan) bkd.bangka.go.id	Informasi Pengadaan dan Pengumuman CPNS, PPPK, dan Lelang Jabatan	
12.	Sekretariat Daerah	Layanan Informasi Lelang Barang dan Jasa lpse.bangka.go.id	Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	
		Layanan Dokumen dan Informasi Hukum jdih.bangka.go.id	Dokumen Hukum	
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Layanan SRIKANDI srikandi.arsip.go.id	1. Surat menyurat 2. Arsip	

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kedua untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dari RPD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka pada tahun 2025 tidak mengalami hambatan yang berarti, terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang terpenuhi, bahkan realisasi kinerja melampaui target. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di form diberikut :

Tabel 2.3 (T.C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah**	**30,00**	**29**	**29,25**	**29,25**	**100**			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	**13,50**	**10**	**10,25**	**10,25**	**100**			
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	**13**	**12,5**	**13**	**13**	**100**			
		Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	**4,5**	**4,25**	**4,5**	**4,5**	**100**			
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
		Indeks Profesionalisme Aparatur	**72,00**	**67**	**67,1**	**67,1**	**100**	**70,00**		**100**
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	**4,10**					**4,00**		**100**
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	**13,50**					**13,00**		**100**
		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	**30,00**					**29,53**		**100**
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	**100**					**100**		**100**
2.16.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)**	**100**	**29**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	**100**	**10**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	21	7	7	7	100	6		**100**
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	36	12	12	12	100			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19					4		**100**
2.16.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100			
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun(laporan)	114	38	38	38	100			
		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)						29		**100**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12		**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2		**100**
2.16.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	3	16	16	16	100	1		**100**
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1				1	1		**100**

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1				1	1		**100**
2.16.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**
2.16.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang Tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		**100**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12					12		**100**
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1					1		**100**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penambahan aset Perangkat Daerah (%)**	0					**0**		**100**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								**100**
2.16.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang Dikelola sesuai peraturan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**100**
2.16.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		**100**
2.16.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		**100**
2.16.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12		**100**
2.16.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**75**		**100**
2.16.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang tertangani (unit)	33	11	11	11	100	12		**100**
2.16.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	1	1	1	100	1		**100**
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Julah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1					1		**100**
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**80**					**75**		**100**
2.16.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab**	**Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik (%)**	**98**	**67,14**	**67,14**	**67,14**	**100**			
		Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola						**100**		**100**
		Persentase Informasi publik yang disampaikan melalui media						**100**		**100**
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti						**100**		**100**
		Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia						**50**		**100**
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi						**100**		**100**
2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disampaikan kepada	100	500	500	303	60,6			
		Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50					30		**100**
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media komunikasi public milik pemere=intah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	70					70		**100**
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis								

	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya								
		Jumlah ASN bidang komunikasi public yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatiham	2					2		**100**
2.16.02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SARPRAS yang Tersedia (paket)	3	1	1	1	100			
		Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	9	3	3	2	66,67			
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi Program atau Kebijakan								**100**
2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	100	30	213,33	94	44,1			
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)**	**58,82**	**44,12**	**50**	**96,55**	**193**			
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan intra Pemerintah (JIP)	**83,33**					**83,33**		**100**
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Cakupan Layanan SPBE	**100**					**100**		**100**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	**Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik**								
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
2.16.03.2.02	**Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
		Nilai Domain kebijakan internal	**2,50**					**2,50**		**100**
		Nilai Domain Layanan SPBE	**2,45**					**2,45**		**100**
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	**3,95**					**3,95**		**100**
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE (nilai)	3,1	2,7	3	1,85	61,67			
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	15	5	5	6	120			
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan pemda	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan system penghubung layanan pemda	12					12		**12**
	Penyelenggaraan Jaringan intra pemerintah daerah Kab/Kota	Jumlah PD di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra oemerintah daerah kab/Kota	34					34		**34**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
2.20.02	**PROGRAM PPENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)**	**58,82**	**44,12**	**50**	**96,55**	**193**			
		Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi	**100**					**100**		**100**
2.20.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**			
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	15	5	5	5	100			
	Penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup daerah kab/kota	Persentase data sectoral yang diolah dan dianalisis persentase SDM statsitik yang memiliki kompetensi	100					100		**100**
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi								

	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun								
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)**	**58,82**	**44,12**	**50**	**96,55**	**96,55**			
		Indeks KAMI (Kematangan)						**1**		**100**
2.21.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab**	**Indeks KAMI (Kematangan)**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**			
		Nilai Tata kelola Keamanan Informasi	**1**					**1**		**100**
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kab/kota berbasis	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daearah kab/kota berbasis elektronik dan non elektornik	2							
2.21.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan IT Security Assesment (aplikasi)	12	4	4	0	0			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34					34		**100**

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan output ***Indeks KAMI***, realisasinya tidak ada.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan output ***Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan ITSA***, realisasinya tidak ada.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025, program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
     - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan :
   - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah
     - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
     - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
     - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:
   - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:
   - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
   - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
     - Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. *Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:*

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. *Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:*

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait

e. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah*

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2024 – 2026, secara umum seluruh program/ kegiatan ditarget akan direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
2) Program Informasi dan Komunikasi Publik target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
3) Program Aplikasi Informatika target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);
5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi target akan tercapai 100 % pada akhir periode Renstra (2026);

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab berdasarkan uraian pada sub bab 2.1.3, maka dapat diambil kebijakan/ tindakan sebagai berikut :

1. Menyusun kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Menyusun kembali penetapan target kinerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran tahun berjalan.

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tidak ada capaian SPM.

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai sebagai berikut :

- Urusan Kominfo

1) Peningkatan jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo;
2) Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi;
3) Ketersediaan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.

- Urusan Persandian

  1) Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan
  2) Keterbatasan asset untuk penanganan insiden siber

- Urusan Statistik

  1) Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance).

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara

publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www).

Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

a. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan egovernment. Hal ini ditunjukkan dengan penertiban email perangkat daerah dan optimalisasi penggunaan email tersebut dalam penyampaian informasi, juga mendesak terwujudnya command centre dalam rangka pengendalian dan percepatan komunikasi dan informasi internal pemerintah kabupaten serta dengan publik.
2. Ketersediaan infrastruktur untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung runningnya aplikasi utama di Pemerintah Kabupaten Bangka (e-planning, e-budgeting/sipkd, eperijinan/sipadu, pajak online, dsb).
3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangan e-government.

b. Kelemahan

1. Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam workflow aplikasi. Bahwa proses penerapan sebuah aplikasi pada setiap perangkat daerah terlihat hanya menjadi urusan middle management hingga ke staff. Top management disetiap perangkat daerah tidak banyak yang mau terlibat aktif atau punya keinginan yang kuat untuk turut menguasainya.
2. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (Tingkat Literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT yang tidak banyak juga mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government.
3. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap perangkat daerah. Penguatan daya terima terhadap sebuah perubahan di masing-masing perangkat daerah seringkali tidak mengkristal dikalangan pimpinan maupun staf. Bahwa setiap perubahan akan menimbulkan resistensi. Upaya

meminimalisir resistensi yang ada dapat dilakukan dengan internalisasi perubahan itu sendiri.

B. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya mempenetrasi proses kerja yang ada dibirokrasi pemerintah daerah. Percepatan proses (efisien dan efektif) secara waktu, transparansi, akuntabel menjadi nilai yang dituju dengan kemajuan itu.
2. Peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika yang semakin komprehensif. Saat ini belum tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistic mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri atau kepala lembaga negara yang menangani urusan tersebut dalam memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah.
3. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satunya Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik. Dengan menjadi bagian utama system pemerintahan eletronik dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa e-government telah menjadi sebuah keniscayaan dari perubahan besar yang ingin dicapai secara nasional.

b. Ancaman/Tantangan

1. Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Masyarakat semakin menunjukkan partisipasinya dalam mengontrol pemerintah dengan semakin tingginya nilai- nilai kritis yang disampaikan sebagai pengguna layanan publik.
2. Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum adanya kesamaan cara pandang bagi perangkat daerah terhadap pentingnya integrasi data, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan data centre yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kominfotik Kabupaten Bangka kedepannya.
3. Semakin tingginya kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (cyber crime). Bahwa hari ini perangkat daerah beramai-ramai mendisain dan membangun aplikasi atau system informasi, namun tidak dibarengi dengan

kesadaran atau pemahaman untuk melakukan upaya pengamanan informasi atau data yang terdapat pada aplikasi/system informasi tersebut.

2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka tidak ada telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

2.5 Inovasi Bidang Urusan

Tata Kelola pengendalian Menara telekomunikasi yang belum optimal, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka melakukan inovasi sinergitas tatalaksana system pengendalian Menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka yang dikomandoi Bidang Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan pengendalian berupaya untuk dilakukan penataan sesuai dengan ketataruangan dan kebutuhan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah ***"Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan"*** dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi
2. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
3. Pembangunan SDM
4. Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterikatan antara Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat disajikan pada tabel Berikut ini :

Tabel 3.1

Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2027 dengan Sasaran Pembangunan

Tema: ***"Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi unggulan Secara Berkelanjutan"***		
No.	**Prioritas**	**Sasaran**
1.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat
2.	Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
3.	Pembangunan SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
4.	Penguatan Sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (ekonomi hijau dan biru)	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka dukungan terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027 sebagaimana tersebut diatas dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran beserta target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinkominfotik Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Dinkominfotik pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-3 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, yaitu Reformasi Birokrasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya akuntabilitasi kinerja birokrasi.

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Renja Dinkominfotik Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2027
1.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks SPBE	3,25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	77,40 (BB)
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi	6,15
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,1

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bangka Tahun 2027 adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2027;
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2027;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinkominfotik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2) Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi
3) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data

3.2 Arah Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung Tema “Penguatan Transformasi”. RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Visi RPJMN ini adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka dalam RPJMN ini mengusung 8 (delapan) misi/asta cita/prioritas nasional yaitu :

1) Memperkokoh Idiologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),
2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru,
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi,
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Ketaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas,

5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai di Dalam Negeri,
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan,
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pendegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan, dan
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinkominfotik Kab. Bangka telah disusun yang terdiri dari 5 program dan 10 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
   - Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

III. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
   - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangkatahun 2027 berjumlah 5 program dan 11 kegiatan serta 19 Sub Kegiatan dengan lokasi kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangkadan lingkup Kabupaten Bangka. Total dana/pagu indikatif sesuai dengan batasan pagu Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 sebesar Rp.8.729.143.855,00 yang bersumber dari APBD.

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2027

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada Tahun 2027 mendukung prioritas pembangunan ***"Penguatan Kapasitas Birokrasi"*** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kab.Bangka

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**5.358.293.855,00**	**APBD**			**5.913.065.662,50**
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		**29,00**	**14.900.000,00**			**29,53**	**35.332.422,00**
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		**12,75**				**13,00**	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		**0,00**	**4.435.850.719,00**			**0,00**	**4.879.435.790,90**
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah		**68,00**	**55.174.926,00**			**70,00**	**60.692.418,60**
		Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah		**3,90**	**266.843.000,00**			**4,00**	**293.527.300,00**
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		**1,00**	**585.525.210,00**			**1,00**	**644.077.731,00**
2.16.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Kab. Bangka**	**100%**	**14.900.000,00**			**100%**	**35.332.422,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.16.01.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Kab. Bangka*	6 dokumen	8.450.000,00			*6 dokumen*	22.272.422,00
2.16.01.2.01.06	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Kab. Bangka*	4 laporan	6.450.000,00			*4 laporan*	13.060.000,00
2.16.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Kab. Bangka**	**100%**	**4.435.850.719,00**			**100%**	**4.879.435.790,90**
2.16.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Bangka*	*26 orang/bulan*	*4.435.850.719,00*			26 orang/bulan	4.879.435.790,90
2.16.01.2.02.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Kab. Bangka*	*12 laporan*	-			12 laporan	-
2.16.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Kab. Bangka**	**18%**	**55.174.926,00**			**18%**	**60.692.418,60**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**100%**				**100%**	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		**100%**				**100%**	

2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 paket	9.750.000,00	APBD		1 paket	10.725.000,00
2.16.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2.16.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 orang	45.424.926,00			26 orang	49.967.418,60
2.16.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**266.843.000,00**			**100%**	**293.527.300,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**3**				**3**	
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	266.843.000,00			12 laporan	293.527.300,00
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dokumen	-			12 dokumen	-
2.16.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangka**	**80%**	**50.450.000,00**			**80%**	**55.495.000,00**
2.16.01.2.07.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*		*5 unit*	-			*5 unit*	-
2.16.01.2.07.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*		*1 Paket*	-			*1 Paket*	-
2.16.01.2.07.09	*Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*		*1 unit*	50.450.000,00			*1 unit*	55.495.000,00
2.16.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangka**	**100%**	**228.035.210,00**			**100%**	**250.838.731,00**
2.16.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Bangka*	12 Laporan	81.580.260,00			12 Laporan	89.738.286,00
2.16.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab. Bangka*	12 Laporan	140.690.000,00			12 Laporan	154.759.000,00
2.16.01.2.08.04	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab. Bangka*	12 Laporan	5.764.950,00			12 Laporan	6.341.445,00
2.16.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik**		**100%**	**307.040.000,00**			**100%**	**337.744.000,00**
2.16.01.2.09.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab. Bangka*	12 unit	113.890.000,00			12 unit	125.279.000,00
2.16.01.2.09.06	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Kab. Bangka*	40 Unit	42.460.000,00			40 Unit	46.706.000,00
2.16.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Kab. Bangka*	1 Unit	150.690.000,00			1 Unit	165.759.000,00
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**100%**	**983.540.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.081.894.000,00**
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		**75**	**983.540.000,00**			**85**	**1.081.894.000,00**
02.16.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola**	**Kab. Bangka**	**100%**	**890.840.000,00**			**100%**	**979.924.000,00**
02.16.02.2.01.0014	*Sub Kegiatan Relasi Media*	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.*	*Kab. Bangka*	1 Laporan	-			1 Laporan	-

		terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media							
02.16.02.2.01.0 015	*Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat*	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	*Kab. Bangka*	15 Komunitas	-			15 Komunitas	-
02.16.02.2.01.0 019	*Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik*	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	*Kab. Bangka*	5 Rekomendasi	-			5 Rekomendasi	-
02.16.02.2.01.0 021	*Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	*Kab. Bangka*	70 Media	890.840.000,00			70 Media	979.924.000,00
02.16.02.2.01.0 022	*Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik*	*Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun*	*Kab. Bangka*	12 dokumen	-			12 dokumen	-
02.16.02.2.01.0 023	*Sub Kegiatan Penyusunan Konten*	*Jumlah Konten Informasi Publik*	*Kab. Bangka*	500 konten	-			500 konten	-
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti		**100%**	**92.700.000,00**			**100%**	**101.970.000,00**
02.16.02.2.01.0 017	*Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik*	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	*Kab. Bangka*	12 Permohonan	92.700.000,00			12 dokumen	101.970.000,00
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi		**25%**	**-**			**50%**	**-**
02.16.02.2.01.0 024	*Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	*Kab. Bangka*	2 orang	-			2 orang	-
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**2.176.045.000,00**	**APBD**			**2.176.045.000,00**
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)		**100,00%**	**2.176.045.000,00**			**100,00%**	**2.176.045.000,00**
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE		**66,67**	**2.176.045.000,00**			**83,33**	**2.176.045.000,00**
02.16.03.2.02	**Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai domain kebijakan internal**	**Kab. Bangka**	**3 Nilai**	**2.176.045.000,00**			**4 Nilai**	**2.176.045.000,00**
02.16.03.2.02.0 019	*Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*	*Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*	*Kab. Bangka*	*12 dokumen*	-			*12 dokumen*	-
02.16.03.2.02.0 024	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*Kab. Bangka*	*34 Perangkat Daerah*	*1.840.960.000,00*			*34 Perangkat Daerah*	1.840.960.000,00
02.16.03.2.02.0 025	*Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi*	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	*Kab. Bangka*	*12 Layanan*	-			*12 Layanan*	-
02.16.03.2.02.0 026	*Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	-			*1 Dokumen*	-
02.16.03.2.02.0 034	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan*	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	*Kab. Bangka*	*5 Aplikasi*	*335.085.000,00*			*5 Aplikasi*	335.085.000,00
02.16.03.2.02.0 035	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE*	*Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE*	*Kab. Bangka*	*1 Laporan*	-			*1 Laporan*	-
02.16.03.2.02.0 036	*Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet*	*Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*		*34 Perangkat daerah*	-			*34 Perangkat daerah*	-

02.16.03.2.02.0037	*Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah*	*Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah*		*12 Dokumen*	-			*12 Dokumen*	-
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**30.900.000,00**				**-**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**30.900.000,00**	**APBD**			**-**
		Persentase Data Sektoral yang terintegrasi		**58,82%**	**30.900.000,00**			**79,41%**	**-**
		Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi		**25,00**	**30.900.000,00**			**50,00**	**-**
2.20.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis**	**Kab. Bangka**	**58,82%**	**30.900.000,00**			**79,41%**	**30.900.000,00**
2.20.02.2.01.0019	*Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral*	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.*	*Kab. Bangka*	100%	24.750.000,00			100%	24.750.000,00
2.20.02.2.01.0020	*Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	*Kab. Bangka*	2 Orang	6.150.000,00			2 Orang	6.150.000,00
2.20.02.2.01.0021	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar*	*Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral*	*Kab. Bangka*	100%	-			100%	-
2.20.02.2.01.0022	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	*Kab. Bangka*	1 Laporan	-			1 Laporan	-
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**386.628.624,80**				**386.628.624,80**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**180.365.000,00**	**APBD**			**198.401.500,00**
		Indeks KAMI		**Kematangan 1**	**180.365.000,00**			**Kematangan 1**	**198.401.500,00**
		Nilai Kematangan Indeks KAMI		**Kematangan 1**	**-**			**Kematangan 1**	**-**
2.21.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kematangan Indeks KAMI**	**Kab. Bangka**	**Kematangan 1**	**180.365.000,00**			**Kematangan 1**	**198.401.500,00**
2.21.02.2.01.0005	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Kab. Bangka*	2 Laporan	120.690.000,00			2 Laporan	132.759.000,00
2.21.02.2.01.0007	*Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	*Kab. Bangka*	34 perangkat daerah	59.675.000,00			34 perangkat daerah	65.642.500,00
2.21.02.2.02	**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Teknologi Keamanan Informasi**	**Kab. Bangka**	**Kematangan 1**	**-**			**Kematangan 1**	**-**
2.21.02.2.02.0002	*Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.*	*Kab. Bangka*	1 Kegiatan	-			34 perangkat daerah	-
JUMLAH					**8.729.143.855,00**				**9.369.406.162,50**

Pada Tahun 2027 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp.**9.369.406.162,50**

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027 :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Dinkominfotik Tahun 2027

No.	Indikator	satuan	Target IKU 2027	Ket
1	2	3	4	5
1	Hasil Evaluasi AKIP Dinkominfotik	Nilai	BB (77,40)	-
2	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi	Nilai	6,15	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,10	-

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), berikut target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2027 :

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinkominfotik Tahun 2027

NO.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET TAHUN	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025	2027		
1	2	3	4	6	10	11
A.	**INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**					
III.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	N/A	N/A	Dinkominfotik
IV.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,8	3,25	4,00	Dinkominfotik
II.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**					
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**					
10.	**Komunikasi dan Informatika**					
10.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	Dinkominfotik

10.2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	Dinkominfotik
10.3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	35	40	55	Dinkominfotik
14.	**Statistik**					
14.1.	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%		100	100	Dinkominfotik
15.	**Persandian**					
15.1.	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	%	0	15	30	Dinkominfotik
D.	**Fungsi Penunjang**					
5.	**Transparansi dan partisipasi publik**					
5.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	Dinkominfotik
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	Dinkominfotik

BAB VI

PENUTUP

6.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian

Renja Perangkat Daerah Dinkominfotik Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027 yaitu "***Inovasi dan Hilirisasi Sektor Ekonomi Unggulan Secara Berkelanjutan***", dan penjabaran dari tujuan Dinkominfotik Kabupaten Bangka yang tertuang dalam Renstra yaitu "***Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi***".

Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfotik Tahun 2027 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinkominfotik yang telah dituangkan dalam Renstra Dinkominfotik Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinkominfotik adalah ***"Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi"*** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: ***"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkominfotik" dan "Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi"***.

Pada tahun 2027 Dinkominfotik akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp.**9.369.406.162,50**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 11 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinkominfotik dan lingkup Kabupaten Bangka.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2027, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Diskominfotik Kabupaten Bangka haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Melakukan reviu kegiatan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan, baik dari segi penjadwalan, faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, renja 2027 ini juga digunakansebagai tolok ukur dalam pertanggung jawaban kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraantugas, yang mengandung acuan, bahwa hasil dari setiap kegiatandapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/1146 /BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum:
   a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
   b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
   c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim:
   a. penanggung jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
   c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
   d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 4 Desember 2025
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.3/1146/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 4 Desember 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2027

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisai Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegewaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penangulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penangulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretarat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustkaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 4 Desember 2025

BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

JADWAL PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA 2027

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD	minggu I Desember 2025	Bappeda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	minggu I Desember 2025	Seluruh Perangkat Daerah
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2026	Seluruh Perangkat Daerah
4	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	9 Februari 2026	Bappeda
5	Persetujuan Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Daerah	12 Februari 2026	Bappeda
6	Penyampaian SE Bupati tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja-PD	12 Februari 2026	Bappeda
7	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD menjadi Rancangan Renja PD	12 Februari – 6 Maret 2026	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penyampaian Draft Rancangan Renja PD ke Bappeda	Paling lambat 26 Februari 2026	Seluruh Perangkat Daerah
9	Input Rincian Belanja Rancangan Renja PD ke SIPD	20 Februari – 5 Maret 2026	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan Pembahasan/Verifikasi Pokok Pikiran DPRD	23 – 25 Februari 2026	Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Bappeda
11	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	26 Februari – 5 Maret 2026	Bappeda

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
12	Penyusunan Rancangan RKPD	26 Februari – 6 Maret 2026	Bappeda
13	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	9 – 13 Maret 2026	Bappeda dan Seluruh Perangkat Daerah
14	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	26 Maret – 4 Mei 2026	Bappeda
15	Reviu Ranhir RKPD oleh APIP	5 – 20 Mei 2026	Inspektorat
16	Fasilitasi Ranhir RKPD oleh Gubernur	2 – 17 Juni 2026	Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung
17	Penetapan RKPD melalui Perkada	29 – 30 Juni 2026	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan
18	Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD	6 – 13 Juli 2026	Seluruh Perangkat Daerah
19	Reviu Ranhir Renja PD oleh APIP	13 – 20 Juli 2026	Inspektorat
20	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda	21 – 24 Juli 2026	Bappeda
21	Penetapan Renja PD melalui Perkada	28 Juli 2026	Paling lambat 1 bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan

VERIFIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2026 DI RENSTRA PD	TARGET DI P- RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota							
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	*3,75*	*29,53*	*4,00*	*29,53*
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	12,75	13,00	70,00	13,00
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persentase	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks	*70,00*	*70,00*	*100,00*	*70,00*
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase	*12,75*	*100,00*	*13,00*	*100,00*
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	Persentase	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	Persentase	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	4	4	4	4
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Persentase	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26	32	26	32
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan terhadap kelengkapan atribut pegawai	Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap	Persentase	100	18	100	18
		Meningkatnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	100	25	100	25
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	1	1	1	1
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	0	26	0	26
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	12	12	12
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	12	12	12	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan lsitrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dokumen	12	12	12	12

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2026 DI RENSTRA PD	TARGET DI P- RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliaranya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase	75	100	75	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12	12
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	31	40	31	40
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	***Indeks***	***79,00***	***79,00***	***79,00***	***79,00***
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Infomasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100
			Persentase Informasi dan Dokumentasi yang dikelola	Persentase	100	100	100	100
			Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persentase	35	35	35	35
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	70	70	70	70
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	12	12	12	12
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	***Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi***	***Indeks***	***6,10***	***6,10***	***6,10***	***6,10***
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Menjaga Stabilitas Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Persentase	*100*	*100*	*100*	*100*
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Infrastruktur TIK	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD	34	34	34	34
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	***Indeks***	***79,00***	***79,00***	***79,00***	***79,00***
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	*100*	*100*	*100*	*100*
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral	Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi	Persentase	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai	2	2	2	2

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2026 DI RENSTRA PD	TARGET DI P- RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	***Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi***	***Indeks***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***N/A***
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Kematangan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	Indeks	*0,33*	*0,33*	*0,33*	*0,33*
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	5	5	5	5
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	2	2	2

Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bangka
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**5.358.293.855,00**	**APBD**			**5.913.065.662,50**
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		**29,00**	**14.900.000,00**			**29,53**	**35.332.422,00**
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		**12,75**				**13,00**	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		**0,00**	**4.435.850.719,00**			**0,00**	**4.879.435.790,90**
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah		**68,00**	**55.174.926,00**			**70,00**	**60.692.418,60**
		Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah		**3,90**	**266.843.000,00**			**4,00**	**293.527.300,00**
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		**1,00**	**585.525.210,00**			**1,00**	**644.077.731,00**
2.16.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Kab. Bangka**	**100%**	**14.900.000,00**			**100%**	**35.332.422,00**
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		**100%**				**100%**	
2.16.01.2.01.01	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun*	*Kab. Bangka*	6 dokumen	8.450.000,00			*6 dokumen*	22.272.422,00
2.16.01.2.01.06	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan kinerja yang disusun*	*Kab. Bangka*	4 laporan	6.450.000,00			*4 laporan*	13.060.000,00
2.16.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar**	**Kab. Bangka**	**100%**	**4.435.850.719,00**			**100%**	**4.879.435.790,90**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.16.01.2.02.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Kab. Bangka*	*26 orang/bulan*	*4.435.850.719,00*			26 orang/bulan	4.879.435.790,90
2.16.01.2.02.05	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Kab. Bangka*	*12 laporan*	-			12 laporan	-
2.16.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi**	**Kab. Bangka**	**18%**	**55.174.926,00**			**18%**	**60.692.418,60**
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		**100%**				**100%**	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		**100%**				**100%**	
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 paket	9.750.000,00	APBD		1 paket	10.725.000,00
2.16.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
2.16.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 orang	45.424.926,00			26 orang	49.967.418,60
2.16.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan**		**100%**	**266.843.000,00**			**100%**	**293.527.300,00**
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		**3**				**3**	
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	266.843.000,00			12 laporan	293.527.300,00
5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dokumen	-			12 dokumen	-
2.16.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangka**	**80%**	**50.450.000,00**			**80%**	**55.495.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.16.01.2.07.02	*Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*		*5 unit*	-			*5 unit*	-
2.16.01.2.07.05	*Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*		*1 Paket*	-			*1 Paket*	-
2.16.01.2.07.09	*Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*		*1 unit*	50.450.000,00			*1 unit*	55.495.000,00
2.16.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bangka**	**100%**	**228.035.210,00**			**100%**	**250.838.731,00**
2.16.01.2.08.01	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Bangka*	12 Laporan	81.580.260,00			12 Laporan	89.738.286,00
2.16.01.2.08.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab. Bangka*	12 Laporan	140.690.000,00			12 Laporan	154.759.000,00
2.16.01.2.08.04	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab. Bangka*	12 Laporan	5.764.950,00			12 Laporan	6.341.445,00
2.16.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam kondisi baik**		**100%**	**307.040.000,00**			**100%**	**337.744.000,00**
2.16.01.2.09.02	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*Kab. Bangka*	12 unit	113.890.000,00			12 unit	125.279.000,00
2.16.01.2.09.06	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Kab. Bangka*	40 Unit	42.460.000,00			40 Unit	46.706.000,00
2.16.01.2.09.09	*Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Kab. Bangka*	1 Unit	150.690.000,00			1 Unit	165.759.000,00
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**100%**	**983.540.000,00**	**APBD**		**100%**	**1.081.894.000,00**
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		**75**	**983.540.000,00**			**85**	**1.081.894.000,00**
02.16.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola**	**Kab. Bangka**	**100%**	**890.840.000,00**			**100%**	**979.924.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
02.16.02.2.01.0014	*Sub Kegiatan Relasi Media*	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	*Kab. Bangka*	1 Laporan	-			1 Laporan	-
02.16.02.2.01.0015	*Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat*	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	*Kab. Bangka*	15 Komunitas	-			15 Komunitas	-
02.16.02.2.01.0019	*Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik*	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	*Kab. Bangka*	5 Rekomendasi	-			5 Rekomendasi	-
02.16.02.2.01.0021	*Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	*Kab. Bangka*	70 Media	890.840.000,00			70 Media	979.924.000,00
02.16.02.2.01.0022	*Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik*	*Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun*	*Kab. Bangka*	12 dokumen	-			12 dokumen	-
02.16.02.2.01.0023	*Sub Kegiatan Penyusunan Konten*	*Jumlah Konten Informasi Publik*	*Kab. Bangka*	500 konten	-			500 konten	-
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti		**100%**	**92.700.000,00**			**100%**	**101.970.000,00**
02.16.02.2.01.0017	*Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik*	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	*Kab. Bangka*	12 Permohonan	92.700.000,00			12 dokumen	101.970.000,00
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi		**25%**	**-**			**50%**	**-**
02.16.02.2.01.0024	*Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	*Kab. Bangka*	2 orang	-			2 orang	-
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**2.176.045.000,00**	**APBD**			**2.176.045.000,00**
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)		**100,00%**	**2.176.045.000,00**			**100,00%**	**2.176.045.000,00**
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE		**66,67**	**2.176.045.000,00**			**83,33**	**2.176.045.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
02.16.03.2.02	**Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai domain kebijakan internal**	**Kab. Bangka**	**3 Nilai**	**2.176.045.000,00**			**4 Nilai**	**2.176.045.000,00**
02.16.03.2.02.0019	*Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*	*Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE*	*Kab. Bangka*	*12 dokumen*	*-*			*12 dokumen*	*-*
02.16.03.2.02.0024	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*Kab. Bangka*	*34 Perangkat Daerah*	*1.840.960.000,00*			*34 Perangkat Daerah*	1.840.960.000,00
02.16.03.2.02.0025	*Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi*	*Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional*	*Kab. Bangka*	*12 Layanan*	*-*			*12 Layanan*	*-*
02.16.03.2.02.0026	*Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo*	*Kab. Bangka*	*1 Dokumen*	*-*			*1 Dokumen*	*-*
02.16.03.2.02.0034	*Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan*	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	*Kab. Bangka*	*5 Aplikasi*	*335.085.000,00*			*5 Aplikasi*	335.085.000,00
02.16.03.2.02.0035	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE*	*Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE*	*Kab. Bangka*	*1 Laporan*	*-*			*1 Laporan*	*-*
02.16.03.2.02.0036	*Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet*	*Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*		*34 Perangkat daerah*	*-*			*34 Perangkat daerah*	*-*
02.16.03.2.02.0037	*Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah*	*Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah*		*12 Dokumen*	*-*			*12 Dokumen*	*-*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**30.900.000,00**				**-**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**30.900.000,00**	**APBD**			**-**
		Persentase Data Sektoral yang terintegrasi		**58,82%**	**30.900.000,00**			**79,41%**	**-**
		Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi		**25,00**	**30.900.000,00**			**50,00**	**-**
2.20.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis**	**Kab. Bangka**	**58,82%**	**30.900.000,00**			**79,41%**	**30.900.000,00**
2.20.02.2.01.0019	*Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral*	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.*	*Kab. Bangka*	100%	24.750.000,00			100%	24.750.000,00
2.20.02.2.01.0020	*Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik*	*Kab. Bangka*	2 Orang	6.150.000,00			2 Orang	6.150.000,00
2.20.02.2.01.0021	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar*	*Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral*	*Kab. Bangka*	100%	-			100%	-
2.20.02.2.01.0022	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	*Kab. Bangka*	1 Laporan	-			1 Laporan	-
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**386.628.624,80**				**386.628.624,80**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**180.365.000,00**	**APBD**			**198.401.500,00**
		Indeks KAMI		**Kematangan 1**	**180.365.000,00**			**Kematangan 1**	**198.401.500,00**
		Nilai Kematangan Indeks KAMI		**Kematangan 1**	**-**			**Kematangan 1**	**-**
2.21.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kematangan Indeks KAMI**	**Kab. Bangka**	**Kematangan 1**	**180.365.000,00**			**Kematangan 1**	**198.401.500,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2.21.02.2.01.0005	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Kab. Bangka*	2 Laporan	120.690.000,00			2 Laporan	132.759.000,00
2.21.02.2.01.0007	*Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*	*Kab. Bangka*	34 perangkat daerah	59.675.000,00			34 perangkat daerah	65.642.500,00
2.21.02.2.02	**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Teknologi Keamanan Informasi**	**Kab. Bangka**	**Kematangan 1**	**-**			**Kematangan 1**	**-**
2.21.02.2.02.0002	*Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.*	*Kab. Bangka*	1 Kegiatan	-			34 perangkat daerah	-
JUMLAH					**8.729.143.855,00**				**9.369.406.162,50**